

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan Rasio Keuangan (Tahun 2015-2019)

Mega Silviana¹, Anggiat Situngkir^{2*}, Siti Asnida Nofianna³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
anggiatsitungkir@polmed.ac.id

Abstract

This Study aims to determine the financial performance of the Medan city government which is measured using financial ratios consisting of Effectiveness, Ratio Efficiency, Ratio Harmony, and Growth Ratio. This research approach is in the firm of descriptive approach, namely research conducted by collecting and presenting data received from Medan City Government in the form of data on the amount of the Medan City Government region budget so that it provides a fairly clear picture for the author to analyze and compare with existing theories. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. The findings show that, financial performance of Medan City government during 2015-2019 seen from the effectiveness ratio is in the percentage of 83% including the quite effective category, the efficient ratio has percentage of 79% is included in the less efficient category, the harmony ratio for capital expenditure has an average percentage of 20%, the operating expense ratio has an average percentage of 80% which is include in the compatible category. The growth ratio for incomes has an average 7% in the positive category, 7% in spending growth in the positive category and PAD growth in the positive category.

Keywords: Performance Analysis, Financial Performance, and Financial Ratio.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk dianalisis serta dibandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2015-2019 dilihat dari rasio efektivitas masuk dalam persentase 83% termasuk kategori cukup efektif, rasio efisien memiliki persentase 79% termasuk ke dalam kategori kurang efisien, rasio keserasian untuk belanja modal memiliki rata rata persentase 20%, rasio belanja operasi memiliki rata rata persentase sebesar 80% masuk dalam kategori serasi. Rasio pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan memiliki rata rata sebesar 7% masuk dalam kategori positif, pertumbuhan belanja sebesar 7% masuk dalam kategori positif dan pertumbuhan PAD masuk dalam kategori positif.

Kata kunci: Analisis Kinerja, Kinerja Keuangan, dan Rasio Keuangan.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Keuangan dan mengelola pembangunan sendiri dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Hal mendasar dari keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia melakukan pembangunan daerah tersebut pada faktor sumber daya alam dan karakteristik ekologis lainnya.

Menurut Halim (2007), salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya. Hal

tersebut mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Serta dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Medan menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang mana pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Medan kurang lebih sebanyak 2,5 juta jiwa. Kota Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia, yang mana sebagian besar perekonomian Kota Medan bergerak pada sektor perdagangan, restoran, hotel, transportasi dan industri, semua sektor tersebut menjadi pendukung utama sumber PAD Sumatera Utara dan berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Jika dilihat dari angka yang ada pada tabel yang tersedia maka terdapat perubahan naik turun antara tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Pada PAD jika dilihat maka terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bukan hanya itu pendapatan transfer jauh lebih tinggi dari pendapatan PAD, pendapatan transfer juga mengalami fluktuasi dari tahun ketahun belanja mengalami naik turun dengan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemko Medan, PAD yang diperoleh belum cukup untuk membiayai belanja yang dikeluarkan oleh karena itu masih harus membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam pembiayaan belanja yang dikeluarkan, apakah jika ketika pemerintah daerah belum mampu membiayai belanja yang dikeluarkan sepenuhnya mengaertikan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut memang tidak baik.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas dan Efisiensi

Anthony, Dearden, dan Bedfordb (1993:203) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara suatu pusat pertanggungjawaban terhadap sasaran yang harus dicapai. Hal ini mengindikasikan semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Pusat pertanggungjawaban yang efektif yaitu unit kerja yang mampu meminimalkan bahan masukan atau sumber daya untuk memperoleh hasil tertentu. Akan tetapi, seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk memperoleh capaian sasaran yang ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerja maka dapat dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif.

Pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisiensi, ketika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Artinya semakin kecil rasio efisiensi, tingkat efisiensi pemerintah semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menghitung dengan cermat besarnya jumlah yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diperoleh untuk dapat mengetahui apakah kegiatan pemungutan tersebut efisien atau tidak.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut Fahmi (2018:142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik Kawatu (2009:5) dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

Analisis Kinerja Keuangan

Analisis keuangan menurut Halim (2007:127) ‘merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia’. Pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Rasio Efektivitas

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Efektivitas sendiri merupakan berhubungan dengan pencapaian tujuan yang Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kinerja kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efektivitas

Analisis efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah Kriteria Efisiensi penerimaan daerah, yakni berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode setelahnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Medan khususnya laporan realisasi anggaran dari *website* Pemko Medan. Alat analisis utama yang digunakan untuk kinerja keuangannya ialah rasio keuangan yang terdiri dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Setelah perhitungan dengan rumus masing-masing rasio dilakukan, selanjutnya ditarik kesimpulan akhir untuk menilai kinerja keuangan Pemko Medan melalui rasio yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data hasil perhitungan persentase nilai kenaikan ataupun penurunan melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan pada Pemerintah Kota Medan 2015-2019:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Persentase

| C | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Rasio efektivitas | 84% | 78% | 80% | 81% | 90% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Cukup Efektif</i> |
| 2. Rasio efisiensi | 80% | 79% | 79% | 77% | 80% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Cukup Efisien</i> | <i>Efisien</i> | <i>Efisien</i> | <i>Efisien</i> | <i>Cukup Efisien</i> |
| 3. Rasio keserasian | | | | | |
| Belanja Modal | 21% | 21% | 23% | 18% | 20% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Kurang Serasi</i> |
| Belanja Operasi | 79% | 79% | 77% | 82% | 80% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Serasi</i> | <i>Serasi</i> | <i>Serasi</i> | <i>Serasi</i> | <i>Serasi</i> |
| 4. Rasio pertumbuhan | | | | | |
| Pertumbuhan PAD | 8% | 3% | 13% | -6% | 12% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Negatif</i> | <i>Positif</i> |
| Pertumbuhan pendapatan | 5% | 1% | 2% | -4% | 30% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Negatif</i> | <i>Positif</i> |
| Pertumbuhan Belanja | 17% | 3% | -3% | -4% | 20% |
| <i>Kriteria</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Positif</i> | <i>Negatif</i> | <i>Positif</i> |

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 Tahun (2015-2019) dimulai dari tahun 2015. Rasio efektivitas berada pada persentase sebesar 84% dan hal tersebut masuk pada kriteria cukup efektif, karena berada pada range $80\% < E < 90\%$. Masuk pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 78% jika dilihat melalui laporan realisasi anggaran, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah. Pada tahun 2015 target serta realisasi anggaran berada pada angka 457.966.812.000,00.

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 Tahun (2015-2019) rasio mengalami fluktuasi namun tidak terlalu signifikan, dimulai tahun 2015 persentase menunjukkan diangka 80%, dan masuk pada kategori cukup efisiensi namun pada tahun 2016 turun sebesar 1% menjadi 79% hal itu disebabkan karena adanya penurunan pada belanja operasi seperti belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Setelahnya pada belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan dari 140.895.132.527,00 menjadi 96.818.457.515,00 perubahan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan masuk dalam kategori efisien, untuk tahun 2017 tidak ada penurunan

ataupun kenaikan yang terjadi, artinya bahwa masih termasuk dalam kategori efisien.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2015-2019) dari tahun 2015 terhadap rasio belanja modal sebesar 21% dan masuk dalam kategori kurang serasi, tidak ada perubahan terhadap persentase pada tahun 2016 masih sebesar 21% dan tetap dikatakan bahwa rasio belanja modal pada tahun 2017 kurang serasi. Terjadi kenaikan pada tahun 2017 dikarenakan adanya kenaikan pada belanja modal tanah. Lalu pada tahun 2018 turun kembali menjadi 18% yang disebabkan oleh turunnya belanja modal tanah, dan adanya penurunan yang signifikan pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Pada tahun 2019 naik kembali menjadi 20% yang disebabkan oleh kenaikan pada belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan yang cukup signifikan.

Rasio keserasian Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2015-2019) dilihat dari tahun 2015 terhadap rasio belanja operasi sebesar 79% dan masuk dalam kategori cukup serasi. Pada tahun 2016 tidak ada perbedaan persentase masih dalam persentase sebesar 79%, lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya penurunan disebabkan oleh belanja pegawai yang mengalami penurunan seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, dan tahun 2017 merupakan persentase terkecil dibandingkan 4 tahun lainnya. Lalu pada tahun 2018 belanja operasi naik menjadi 82% dan ini menjadi persentase tertinggi, hal ini disebabkan oleh yang sebelumnya belanja pegawai turun, pada tahun 2018 naik kembali walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan, lalu untuk belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 5% dan mengalami kenaikan sebesar 1% pada tahun 2016. Rasio pertumbuhan sebesar 1% dapat dilihat dari nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2016. Sumber kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun 2015 ke tahun 2016 paling banyak bersumber dari pajak penerangan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sumber kenaikan paling tinggi retribusi daerah berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu, pendapatan yang bersumber pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.

Rasio pertumbuhan pada belanja juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Rasio pertumbuhan belanja dari tahun 2015 ke 2016 adalah sebesar 3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2014 ke 2015, maka pertumbuhan belanja pada tahun 2015 jauh lebih baik dibandingkan 2016. Kenaikan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 3% dapat dilihat dari belanja operasi seperti belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa yang mengalami kenaikan paling tinggi berasal dari Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Barang Jasa BLUD RS. Kenaikan paling signifikan dari belanja modal berasal dari belanja modal Gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap lainnya.

Rasio pertumbuhan pada pendapatan asli daerah menunjukkan angka yang fluktuatif. Pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Kota Medan pada tahun 2015 – 2019 masih mengalami kenaikan dan penurunan, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dilihat bahwa rasio pertumbuhannya hanya naik 3%, berbeda dengan tahun 2015 dimana rasio pertumbuhan dari tahun 2014 adalah sebesar 8%. Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Rasio Keuangan. Berdasarkan rasio efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Demikian pula untuk rasio efisiensi dengan rata-rata persentase sebesar 79% sehingga dikategorikan efisien. Rasio keserasian terhadap belanja operasi memperoleh rata-rata persentase sebesar 80% sehingga masuk dalam kategori serasi sementara untuk belanja modal memperoleh rata-rata persentase yang jauh lebih rendah yaitu 20% sehingga masuk ke dalam kategori tidak serasi. Berdasarkan rasio pertumbuhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan memperoleh rata-rata 7% untuk rasio pertumbuhan pendapatan, 7% rasio pertumbuhan belanja, dan 6% untuk rasio pertumbuhan PAD. Upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, penggunaan anggaran belanja daerah harus tepat sasaran untuk memaksimalkan program kerja Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan juga harus menekan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan kepada masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan lebih memperhatikan kemampuan pemerintah dalam penggunaan target belanja serta pendapatan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Dearden, Bedford. 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi revisi. Jakarta.
- Basir, Cik. 2020. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi Kosep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Erlina, dkk. *Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Radianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Fahmi, Irham. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung. Alfabeta.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016–2017*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(3).
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjito7, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia*. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(1), 19-28.
- Juliadi, Azuar, Dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan. UMSU Press.
- Kasmir. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kawatu, Freddy Samuel. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta. Deepublish.
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketentuan umum penyusunan APBD.
- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi,

Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Iqbal, Muhammad Hasan. 2003. *Materi Statistik*. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Kedua. Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 3, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penentuan Penerimaan Daerah Pedoman Kinerja Keuangan.

Mutiha, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).

PP Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pauwah, S., Saerang, I., & Mandey, S. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *APBD*.

Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti, 7(1).

Putri, A. R., & Kabib, N. (2018, October). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015*. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (pp. 149-157).

Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Kota Magelang*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 60-70.

Sibarani. Pirma. 2019. *Akuntansi Pemerintah NKRI Edisi 4*. Medan: Pirma Prima.

Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Sudarso, Yoyo. Sjarif Devyanthi, Nunung Ayu. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. CV Andi Offset.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
_____. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Afabeta.

Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.

Sumardjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tambuwun, E. L., Pangemanan, S. S., & Afandi, D. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4).

Tobi, M. R., & Idayati, F. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores*

Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(8).

Tri Sulisty, Agus. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia Treasury Review.*, 3(1), 43-59.

Undang-undang No 17 tahun 2003 *tentang keuangan Negara.*

_____ No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*